

## **BAB IV**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SWEDIA DAN ARAB SAUDI SERTA IMPLIKASI POLITIK YANG TERJADI**

Kasus kemanusiaan Raif Badawi tahun 2015 menimbulkan ketegangan diplomatik antara Swedia dan Arab Saudi. Kedua negara merupakan mitra diplomasi yang telah menjalin kerjasama di banyak bidang selama lebih dari 70 tahun (Bershidsky, 2015). Perseteruan antara Swedia dan Arab Saudi atas kasus kemanusiaan Raif Badawi mengakibatkan implikasi politik yang ditandai dengan pembatalan kerjasama pertahanan dan militer. Adanya kontradiksi ideologi antara Swedia dan Arab Saudi dalam memandang kasus kemanusiaan Raif Badawi ini kemudian menimbulkan pergeseran politik luar negeri kedua negara. Baik Swedia dan Arab Saudi dapat dianalisa faktor-faktor perubahan politik luar negeri yang terjadi.

#### **A. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Politik Luar Negeri Swedia**

Pemerintah Swedia dalam mengambil kebijakan untuk mengambil langkah pertentangan terhadap Arab Saudi dilatarbelakangi karena beberapa faktor, yaitu adanya dukungan internasional dan *standing statement* yang sama Raif Badawi, perdebatan domestik, dan karakteristik pemerintahan Partai Sosial-Demokrat di bawah Stefan Löfven dan Margot Wallström.

##### **1. Opini Publik Internasional**

Sebagai negara pertama yang mendeklarasikan kritik terhadap kasus Raif Badawi, Swedia mendapatkan banyak dukungan dari berbagai *platform*, termasuk NGO, media massa, pakar dan akademisi, serta pemerintah negara lain. Dalam posisi ini, Swedia memiliki banyak sekutu yang menyuarakan hal yang sama.

a. Dukungan dari NGO

Pertama, dukungan datang dari Amnesty International. NGO ini memuji tindakan Swedia yang berani menyuarakan kebenaran. Pada 22 Januari 2015, Amnesti Internasional membuka petisi yang ditandatangani oleh 800 ribu orang yang kemudian disampaikan kepada otoritas Arab Saudi untuk membebaskan Raif Badawi. Kampanye lain yang dilakukan adalah kampanye #FreeRaif di berbagai platform media sosial dan telah diikuti oleh banyak orang di dunia maya (Ries, 2015). Kedua, terdapat suara yang sama dari Center for Inquiry (CFI), yang merupakan NGO yang bergerak di bidang HAM, sains, dan sekulerisme. CFI mengirimkan Michael De Dora untuk menjadi perwakilan dalam forum United Nations Human Rights Council untuk menangani kasus Raif Badawi (Center For Inquiry, 2014).

Ketiga, terdapat NGO yang bernama Reporters Without Borders (RSF). Reporters Without Borders mendesak pemerintah Swedia dan Inggris untuk melakukan perundingan kepada Arab Saudi selama kunjungan negara. RSF juga mendesak Swedia untuk mengambil sikap dalam menangani kasus Raif Badawi (Reporters Without Borders, 2016). RSF juga mendesak PBB untuk memberikan teguran terhadap Arab Saudi karena tidak mengimplementasikan *Freedom of Expression* dari *Universal Periodic Review* yang diratifikasi dari United Nations Human Rights Council (Hayden, 2015). Kemudian PEN International juga menyuarakan dukungan terhadap Wallström. Menurut salah satu perwakilan PEN English, Wallström mempunyai keberanian sebagai anggota pemerintah untuk mengkritik Arab Saudi. PEN International juga mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah

Arab Saudi untuk segera membebaskan Raif Badawi dan mendesak Arab Saudi untuk meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (PEN International, 2016).

Kemudian terdapat dukungan dari Front Line Defenders (FLD). Representasi dari FLD menyatakan dukungan terhadap sikap Löfven dan Wallstrom yang mewakili Swedia sebagai negara dari benua Eropa pertama yang berani mengkritisi kasus Badawi. FLD juga ikut menyuarakan kampanye pembebasan Raif Badawi dan mendesak pemerintah Arab Saudi untuk meratifikasi *United Nations International Covenant on Civil and Political Rights* (CCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) serta melakukan amandemen terhadap undang-undang *counter-terrorism* dan undang-undang *cyber crime* Arab Saudi (Front Line Defenders, 2018).

b. Dukungan dari pemerintah negara lain

Dalam melakukan kritik kepada Arab Saudi, Swedia tidaklah sendirian. Terdapat beberapa negara yang juga menyuarakan kritik atas kasus Raif Badawi. Negara-negara seperti United Kingdom, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat juga ikut berkomentar setelah Swedia memberikan kritik pertama kali.

Phillip Hammond selaku Sekretaris Kementerian Luar Negeri United Kingdom memberikan pernyataan resmi yang berbunyi: "*We are seriously concerned by Raif Badawi's case. The UK condemns the use of cruel, inhuman or degrading punishment in all circumstances*" (Pemerintah United Kingdom menyatakan keprihatinan atas kasus Raif Badawi. Kami (Pemerintah UK) mengutuk penggunaan hukuman yang bersifat kejam dan tidak

berperikemanusiaan)” (Green, 2015). Selain itu, kasus Raif Badawi juga menjadi perbincangan dalam Parlemen United Kingdom. Parliamentary Under-Secretary of State in the Foreign & Commonwealth Office membuka diskusi yang diikuti berbagai anggota parlemen seperti Jeremy Corbyn (*Member of Parliament* dari Partai Buruh, Islington Utara). Kerry McCarthy (*Member of Parliament* dari Partai Buruh, Bristol Timur), Stuart McDonald (*Member of Parliament* dari Scottish National Party, Cumbernauld, Kilsyth and Kirkintilloch Timur) and Jim Shannon MP (*Member of Parliament* dari Democratic Unionist Party, Strangford) (Sharp, 2015).

Kemudian pada Maret 2015, Menteri Perekonomian Jerman (sekarang menjadi Wakil Kanselir), Sigmar Gabriel, melakukan perbincangan dengan Raja Salman membicarakan tentang hukuman Raif Badawi (Noack, 2018). Sebanyak lebih 60 persen warga Jerman di media sosial menyetujui tindakan Gabriel mengkritisi pemerintah Arab Saudi (Knight, 2015).

Kanada juga menjadi salah satu negara yang memberikan respon terkait insiden vonis Raif Badawi. Kanada merespon isu tersebut dengan mengatakan bahwa Arab Saudi harus memberikan kebebasan terhadap Raif Badawi. Kanada juga mengusulkan agar Raif Badawi dikembalikan berkumpul bersama istri dan ketiga anaknya yang saat itu sudah menjadi warga negara Kanada (Remiroz, 2018). Politisi Quebec Bernard Drainville, Menteri Hubungan Internasional Kanada Christine St-Pierre dan Menteri Luar Negeri Kanada Rob Nicholson bahkan menyebut insiden Raif Badawi sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Banerjee, 2018). Arab Saudi hanya merespon

singkat kritik Kanada dengan melayangkan peringatan terbuka yang meminta pemerintah Kanada untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya (Hicks, 2015).

Kemudian terdapat Amerika Serikat yang memberikan respon terhadap kasus Raif Badawi. Kritik yang diberikan Amerika Serikat pun melebar jangkauannya, tidak hanya berfokus pada masalah isu Raif Badawi, namun juga implementasi HAM di Arab Saudi secara keseluruhan yang dinilai bobrok (Ronchini, 2015). Sebuah kelompok HAM Amerika menerbitkan laporan yang menuduh Arab Saudi menyediakan hak-hak istimewa kepada para petinggi agama Islam yang mengkhotbahkan kebencian terhadap agama-agama lain, termasuk Kristen, Syiah dan Yahudi (Spencer, How Do You Survive 1000 Lashes?, 2015). Penulis laporan itu mengatakan, hasutan semacam itu memperkuat narasi teror yang dipromosikan oleh kelompok ISIS dan juga pejuang-pejuang ISIS yang memenggal dan memperbudak tawanan mereka yang beragama minoritas di Suriah dan Irak (Dunn, 2015). Terdapat sebanyak 67 member dari Kongres Amerika Serikat yang mengirimkan surat kepada Arab Saudi untuk segera membebaskan Raif Badawi dan Waleed Abu Al-Khair (Brekke, 2015).

- c. Dukungan dari akademisi dan aktivis internasional  
Sebanyak 18 peraih penghargaan Nobel menandatangani surat terbuka yang mendesak para akademisi Arab Saudi untuk menyuarakan kasus Raif Badawi. Banyak juga beberapa akademisi Barat yang merasa keberatan dengan hukuman Raif Badawi (Green, 2015). Kemudian terdapat juga dukungan dari Desmond Tutu (aktivis kemanusiaan dari Afrika Selatan) yang

mengirimkan surat kepada Raja Salman (Benson, 2015). Pada 6 Maret 2016, 2 aktivis sekaligus jurnalis Northern Ireland Union, Eamon McCann dan Felicity McCann, menulis surat terbuka kepada *Belfast Telegraph*, menyatakan hukuman Arab Saudi kepada Raif Badawi merupakan tindakan yang biadab (Belfast Telegraph, 2015).

d. Dukungan dari masyarakat melalui media sosial

Dari berbagai belahan dunia, dukungan pembebasan Raif Badawi datang dari berbagai lapisan masyarakat: aktivis, politisi sampai selebriti. Dukungan akan Raif Badawi ini datang dari berbagai jejaring media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*. Kampanye media sosial ini mempunyai tagar *#FreeRaif* dan telah mengudara sejak awal 2015. Beberapa *outlet* media seperti *The Independent*, *Guardian*, *BBC*, hingga *Associated Press* memberi dukungan kepada Swedia pasca insiden pemblokiran Margot Wallström dalam forum Liga Arab. Beberapa warganet juga menyatakan dukungan atas keberanian kubu Löfven-Wallström dalam memberi sikap terhadap Arab Saudi (Mateus, C. Dillon, & Bruck, 2015).

2. Kondisi Domestik Swedia

Kondisi dalam negeri Swedia juga mempengaruhi proses perubahan politik luar negeri terhadap Arab Saudi. Pasca insiden hukuman cambuk terhadap Raif Badawi ramai diperbincangkan di media sosial, masyarakat Swedia terus mendesak pemerintah Swedia untuk melakukan aksi pembebasan Raif Badawi. Rakyat meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam mengambil sikap terhadap Arab Saudi terkait insiden hukuman Raif Badawi (Tolba & Ahlander, 2015). Bahkan organisasi PEN Internasional yang bekerjasama dengan *Reporters Without Borders* (RSF) melakukan demonstrasi di sepanjang jalan daerah

Skoldungagatan, Stockholm, yang merupakan markas Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Swedia. Masyarakat Swedia meminta secara langsung Duta Besar Abdulaziz H. F. Al Zaid untuk memberikan keterangan (English PEN, 2015).

Sementara di sisi lain, perbedaan pendapat juga terjadi di Kongres Swedia. Selepas kritik dilontarkan oleh Wallström, dan pemutusan kerjasama pertahanan dan persenjataan dibatalkan secara sepihak oleh Swedia, Stefan Löfven sebagai perdana menteri yang sebelumnya pernah menjabat ketua Trade Union Swedia mengadakan pertemuan darurat dengan Kongres Swedia untuk melakukan bahasan mengenai rencana negosiasi ulang dengan Arab Saudi (Ghany, 2015). Namun rencana Löfven ditentang keras tiga koalisi kuat dalam Partai Sosial Demokrat yang menungi dirinya. Kubu Partai Hijau, Partai Liberal dan beberapa Partai Kiri menolak upaya Löfven untuk berdamai dengan Arab Saudi untuk melakukan negosiasi ulang terkait kerjasama pertahanan dan persenjataan (VOA News, 2015).

Dalam memorandum, kesepakatan kerjasama pertahanan dan persenjataan antara Arab Saudi dan Swedia meliputi jual beli peralatan persenjataan, teknologi keamanan, perlengkapan militer, serta bentuk kerjasama lain yang melibatkan riset persenjataan hingga pembangunan pabrik nuklir di Arab Saudi. Carl Schlyter yang merupakan perwakilan dari Partai Hijau menyatakan bahwa sikap Lofven sangat salah jika harus melakukan kerjasama dengan Arab Saudi karena negara tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pernyataan yang sama didukung oleh Maria Weimer selaku perwakilan Partai Liberal. Ia menyatakan bahwa upaya negosiasi ulang terkait kerjasama dengan Arab Saudi akan merusak reputasi Swedia di mata internasional (Ghany, 2015).

### 3. Karakteristik Margot Wallström

Sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström merupakan aktivis yang menjabat sebagai anggota wakil presiden dari European Commission (Savage, 2006). Ia juga pernah menjadi representasi dari berbagai institusi atau badan yang bergerak di bidang perempuan dan lingkungan. Contohnya saja *European Commissioner for the Environment* dari tahun 1999 sampai 2004 dan *United Nations Special Representative on Sexual Violence in Conflict* dari tahun 2010 sampai 2012 (The Local, 2007). Wallström juga merupakan Menteri Luar Negeri Swedia pertama dalam sejarah yang mencetuskan Politik Luar Negeri Feminisme (Scrutton, 2015).

Banyak kritik yang dilontarkan para politisi, baik dari dalam maupun luar Swedia, menyebut bahwa tindakan kritik Wallström merupakan tindakan gegabah karena mengedepankan identitas Swedia dan berambisi untuk mencapai “*moral great power*” dan mengesampingkan urusan keamanan dan ekonomi. Bahkan rekan sesama Partai Sosial Demokrat, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri, Stefan Löfven mengkritisi tindakan Wallström karena tidak melakukan perhitungan terhadap situasi ekonomi Swedia. Pasca insiden pembatalan kerjasama, Wallström bahkan mengungkapkan kepada media, “*I won't back down over my statements on women's rights, democracy and that one shouldn't flog bloggers, I have nothing to be ashamed of*” (Saya tidak akan menarik pernyataan mengenai hak-hak perempuan, demokrasi dan hukuman cambuk terhadap bloggers [Raif Badawi]) (VOA News, 2015).

Karakter Wallström yang moralis ini juga dapat dilihat dari beberapa sikapnya dalam merespon konflik serupa. Contohnya saja pada 30 Oktober 2014 dimana ia menjadi Menteri Luar Negeri dari Uni



Eropa pertama yang mengakui Negara Palestina (Pitarakis, 2010). Hal ini kemudian memicu kemarahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang kemudian menarik Duta Besar Avigdor Lieberman dari Swedia (Khatib, Sweden Officially Recognises State Palestine, 2014). Kemudian pada Desember 2014, Wallström juga pernah mengkritisi aksi kemanusiaan di Ukraina yang dilakukan oleh Swedia. Aksi ini memicu kemarahan Presiden Vladimir Putin yang kemudian melakukan penarikan Duta Besar Ivanovitj Tatarintsev dari Swedia (Dickson, 2014).

## B. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Politik Luar Negeri Arab Saudi

Dalam konflik dengan Swedia, Arab Saudi memutuskan untuk tidak membujuk Swedia melakukan negosiasi ulang terkait pembatalan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Swedia (Mazel, 2015). Sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh Arab Saudi kepada Swedia ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu terdapat faktor secara internasional (opini dan dukungan negara lain) dan faktor struktural (politik domestik).

### 1. Opini Publik Internasional

#### a. Dukungan dari negara-negara teluk

Meskipun mendapat pertentangan dari banyak NGO, media, akademisi, hingga masyarakat luas terkait model hukumannya terhadap Raif Badawi, Arab Saudi ternyata masih mendapat dukungan dari berbagai negara-negara teluk. Salah satu negara yang vokal memberikan dukungan terhadap konflik Arab Saudi dan Swedia adalah negara-negara teluk, yaitu Uni Emirat Arab dan Oman (Samutra, 2014).

Sebagai negara tertangga sekaligus mitra kerjasama yang kuat, Uni Emirat Arab mempunyai hubungan yang baik dengan Arab

Saudi sejak peristiwa *Arab Uprisings* 2011. Melalui perwakilan Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash menyatakan: *“These statements violate the principle of sovereignty upon which the normal relations between countries are based. Such remarks are deemed interference in internal affairs as they do not respect the religious and cultural particularities of states and communities”* (statement [Swedia] merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dimana dasar hubungan kedua negara dibangun. Label dan kritik Swedia dianggap sebagai intervensi internal dan mereka [Swedia] tidak menghormati kekhususan agama dan budaya dari negara maupun komunitas) (Middle East Eye, 2015).

Pasca komentar tersebut, UEA secara resmi menarik duta besarnya dari Stockholm. Penarikan duta besar ini dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa langka karena hubungan kerjasama Swedia dan UAE secara sah baru berjalan selama 6 bulan (Milne, 2015). Kemudian terdapat Negara Oman yang berkomentar: “Hukum Syariah berperan penting sebagai penegak keyakinan dan isu kekerasan dalam Hukum Syariah hanya dibesar-besarkan oleh para anti-Islam dan bahwa setiap negara harus menghargai Arab Saudi sebagai pemegang konstitusi tertinggi di dalam negerinya (The Local, 2015).

b. Dukungan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Selain mendapatkan dukungan dari sesama negara Islam, Arab Saudi juga mendapatkan dukungan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Posisi Arab Saudi sebagai salah satu *founding fathers* dan penyumbang dana terbesar di OKI menempatkan Arab Saudi dalam lingkaran pendukung setianya di organisasi tersebut (Macmillan, 2004). Melalui salah perwakilan

OKI, Yousef Al-Othaimen, OKI menyatakan: “tidak benar bagi Swedia untuk menjadikan wewenang moral dari suatu negara sebagai alat untuk mengkritik dan menghakimi nilai moral dan ideologi negara lain” (Sullivan, 2015).

c. Dukungan dari Negara Somalia

Pasca insiden komentar Swedia terhadap Arab Saudi mencuat di berbagai media, diikuti oleh beberapa dukungan dari negara teluk, Somalia kemudian menjadi negara Afrika pertama yang menyatakan dukungan terhadap Arab Saudi. Salah satu perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Investasi Somalia menyatakan: *“this behavior is dearly prohibited by the diplomatic norms and practices. The blessed religion of Islam and it’s laws was brought to mankind so as to unsure the dignity, freedoms, and integrity of all humans”* (perlakuan [Swedia kepada Arab Saudi] merupakan tindakan terlarang yang melanggar norma dan praktik diplomasi. Agama Islam merupakan agama yang diberkati dan telah membawa kemuliaan, kebebasan, dan integritas bagi banyak manusia) (Garowe Online, 2015).

2. Kondisi Domestik Arab Saudi

Salah satu faktor penting mengenai pengambilan keputusan terkait hubungan diplomatik dengan Swedia dari sisi Arab Saudi ditentukan besar dari faktor domestik. Pasca pembatalan perjanjian pertahanan dan keamanan dengan Swedia, Arab Saudi tidak mencoba melakukan negosiasi ulang. Arab Saudi lantas melakukan aksi penarikan duta besarnya dari Stockholm dan melakukan blokade pidato Wallström sebagai bentuk balasan.

Padahal kerjasama pertahanan dan keamanan antara Swedia dan Arab Saudi mencakup lingkup yang besar dan kompleks. Perjanjian pertahanan dan keamanan yang dibatalkan meliputi sistem militer,

pelatihan dan transfer teknologi, senilai 4,8 miliar Crown Swedia (Rp 7,3 triliun) (Noli, 2016). Kerjasama juga termasuk dalam sistem pertahanan luar angkasa yang dinamakan *Airborne Early Warning* (AEW) yang kemudian melakukan operasi kerjasama bersama Arab Saudi untuk dua kesepakatan baru yaitu GlobalEye AEW dan *multi-role surveillance* dengan total kerjasama sebesar 1,27 miliar dollar (Beraud-Sudreau, 2017).

Penyebab tidak adanya upaya negosiasi dengan Swedia terkait perjanjian pertahanan dan keamanan adalah karena Arab Saudi mempunyai banyak *back-up* kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara lain. Selain memegang predikat sebagai negara dengan tingkat impor senjata terbesar di dunia. Per-tahunnya, negara ini bisa menghabiskan sebanyak 9.8 miliar dollar hanya untuk berbelanja senjata (Bershidsky, 2015). Sebanyak 98% impor persenjataan Arab Saudi berasal dari Amerika Serikat dan Eropa (O'Connor, 2018). Permintaan akan impor persenjataan Arab Saudi meningkat pasca keterlibatan negara tersebut dengan Kelompok Houthis di Yaman (Beswick, 2017). Namun impor senjata dari Swedia bukanlah yang terbesar bagi Arab Saudi karena masih banyak pakta kerjasama dengan negara-negara lain.

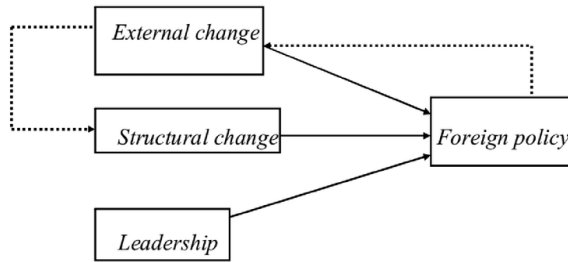
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan Arab Saudi mengaku bahwa upaya pembatalan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Swedia tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keamanan Arab Saudi karena masih ada dukungan kuat dari Amerika Serikat (Ivanova, 2018). Kerjasama yang dilakukan kedua negara ini bahkan mencapai 110 miliar dollar (terhitung sampai pada tahun 2016) (O'Connor, 2018). Kemudian terdapat beberapa negara-negara Eropa yang masih mempunyai pakta impor senjata dengan Arab Saudi. Sebut saja

United Kingdom, Perancis, Jerman, dan Kanada. Pihak otoritas Arab Saudi percaya bahwa kerjasama pertahanan dan keamanan masih bisa berjalan meskipun tanpa adanya pakta dengan Swedia (Bershidsky, 2015).

### C. Perubahan Politik Luar Negeri Swedia dan Arab Saudi

Untuk mencapai pembahasan mengenai perubahan politik luar negeri Swedia dan Arab Saudi, teori yang digunakan adalah yang digagas oleh Charles E. Hermann. Dalam Konsep Perubahan Politik Luar Negeri, Hermann menyatakan bahwa perubahan kebijakan luar negeri secara sederhana sebagai perubahan arah atau *re-direction* dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini merujuk pada bagaimana suatu negara menerapkan cara atau langkah baru agar dapat mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Apabila cara-cara atau metode yang terkandung dalam kebijakan luar negeri yang lama dinilai tidak lagi sesuai terhadap pencapaian kepentingan nasional, maka para *decision maker* akan merumuskan bentuk kebijakan luar negeri yang baru (Hermann, 1990). Penjelasan dari konsep ini sesuai dengan kondisi yang terjadi antara Swedia dan Arab Saudi. Kasus Raif Badawi merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional (merujuk pada kepentingan ideologi yang sebelumnya sudah dibahas dalam Bab III). Adanya perbedaan perspektif dalam memandang isu kemanusiaan inilah kemudian yang mendorong kedua negara untuk mengambil metode baru (dalam hal ini kebijakan baru) terhadap satu sama lain.

Untuk memahami bagaimana faktor-faktor yang diperlukan bagi kedua negara dalam melakukan perbaharuan politik luar negeri, akan digunakan model Perubahan Politik Luar Negeri Adaptif yang dikemukakan oleh James N. Rossenau.



*Sumber: James N. Rosenau, Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Method. New York: Sage Publications*

Dalam bagan tersebut, dijelaskan bahwa terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, yaitu faktor struktural (domestik) dan eksternal (internasional) (Rosenau, 1981). Namun ada juga faktor pendukung lain yang bisa ditambahkan, yaitu faktor *leadership* atau karakter pemimpin dalam membuat keputusan (Hagan, 1995). Dalam kategori domestik, terdapat 5 sumber perubahan yang dapat diidentifikasi, yaitu: (1) birokrasi; (2) opini publik domestik; (3) media; (4) kelompok kepentingan; dan (5) partai politik (Putnam, 1988). Sedangkan dalam sekup internasional, mencakup norma internasional dan pengaruh dari negara maupun aktor-aktor non-negara seperti kelompok transnasional, jaringan teroris, sampai *non-governmental organization* (Keohane & Nye, 2001).

**Pertama**, pembahasan akan difokuskan dari sudut pandang Swedia. Sesuai dengan Poin A di atas, Swedia mempunyai 3 faktor utama yang merupah kebijakan politik luar negerinya terhadap Arab Saudi: faktor eksternal (dukungan dari NGO, negara lain, para akademisi dan tokoh terkenal, serta dari media sosial), faktor struktural (adanya tekanan dari masyarakat dan faktor partai politik), dan karakteristik pemimpin (karakteristik Margot Wallström sebagai menteri luar negeri yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan Swedia terhadap Arab Saudi).

Secara internasional, Swedia mendapat dukungan kuat dari berbagai lapisan masyarakat global. Dukungan datang dari mulai NGO, masyarakat (melalui media sosial), para tokoh dan cendekiawan dunia, sampai dukungan dari pemerintah negara lain. Dukungan dari NGO seperti Amnesty International, Reporters Without Borders (RSF), Center for Inquiry (CFI), Front Line Defenders (FLD), dan PEN Internasional. Kemudian dari para tokoh dunia baik cendekiawan, akademisi, aktivis, hingga para politisi dunia yang mempunyai pandangan sama terkait isu kemanusiaan Raif Badawi. Dukungan dari negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman. Serta dukungan yang datang dari masyarakat luas melalui berbagai kampanye di media sosial. Aksi-aksi dukungan secara internasional tersebut kemudian membentuk sebuah *global public opinion* yang menjadi fondasi bagi Swedia untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang baru. Opini publik internasional menjadi input yang penting dalam perumusan politik luar negeri suatu negara (Shapiro, Isernia, & Nacos, 2000). Hal itu dikarenakan opini publik internasional menjadi sumber dimana para pembuat kebijakan mencari dukungan dan afirmasi (yang didasarkan pada norma internasional) untuk membenarkan tindakan atau kebijakan yang diambil (Risse-Kappen, 1991).

Kemudian secara domestik, terdapat faktor yang datang dari masyarakat Swedia dan partai politik di Parlemen. Demonstrasi yang terjadi di Swedia, dimana rakyat menuntut pemerintah untuk mengambil sikap terhadap Arab Saudi, berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dalam suatu negara, ketidakpuasan rakyat akan suatu masalah, dan kemudian demonstrasi terjadi, pemerintah akan cenderung tertekan dan dapat mengarah pada perubahan politik luar negeri negara tersebut (Shapiro, Isernia, & Nacos, 2000). Di sisi lain, dalam negeri Swedia juga terjadi pertentangan dalam parlemen. Perdana Menteri Stefan Löfven yang awalnya

tidak setuju dengan rencana pembatalan kerjasama keamanan dan pertahanan dengan Arab Saudi dan mencoba untuk melakukan negosiasi ulang harus menemui pertentangan dari berbagai koalisi Partai Sosial Demokrat. Pemerintah suatu negara sangat bergantung pada dukungan partai maupun anggota partai untuk merumuskan kebijakan tertentu (Gustavsson, 1998). Dukungan penuh diberikan oleh tiga koalisi partai (Partai Hijau, Partai Kiri, dan Partai Liberal) kepada Wallström yang mengusulkan untuk mengambil sikap pertentangan dengan Arab Saudi.

Kemudian dari faktor karakteristik kepemimpinan Margot Wallström. Menurut Kingdon, terdapat faktor yang dinamakan “*policy windows*”, dimana persepsi para pembuat keputusan sangat berpengaruh terhadap bentuk keputusan yang dirumuskan (Kingdon, 1984). Margot Wallström adalah tokoh politik yang moralis dan memandang politik luar negeri sebagai sebuah arena untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Idealisasinya dalam memandang kasus kemanusiaan Raif Badawi menempatkan Swedia sebagai *moral superpower*, dimana Swedia merasa memiliki andil untuk mempromosikan isu tersebut. Keterlibatan Swedia inilah kemudian yang dianggap sebagai sebuah bentuk intervensi dan akhirnya menimbulkan ketegangan diplomatik kedua negara. Kepercayaan Margot Wallström akan nilai-nilai kemanusiaan merupakan asumsi fundamental yang mempengaruhi interpretasi pemimpin akan sesuatu terhadap lingkungan serta strategi apa yang akan digunakan untuk membentuk politik luar negeri yang baru (Hermann & Milburn, 1977).

**Kedua**, pembahasan dari sudut pandang Arab Saudi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Poin B, Arab Saudi mendapat dukungan dari beberapa negara dan organisasi internasional, seperti UEA, Oman, Somalia, dan OKI. Secara domestik, hal yang mempengaruhi politik luar



negerinya adalah dari faktor birokratis kerajaan Arab Saudi.

Dukungan dari berbagai negara terhadap Arab Saudi ini dapat dikategorikan sama seperti Swedia, yaitu kategori opini publik internasional. Meskipun bentuk dukungan yang diterima Arab Saudi hanya dilakukan sebagian kecil negara di dunia, namun hal ini dapat mempengaruhi proses keputusan kebijakan politik luar negeri. Aktor-aktor regional yang mendukung Arab Saudi (contohnya seperti UEA dan Oman) mempunyai kesamaan tradisi, norma, nilai, dan sejarah (Hagan, Rosati, & Sampson, 1994). Dukungan dari UAE, Oman, Somalia, dan OKI ini dapat dijadikan pertimbangan untuk melaukan justifikasi atau pembenaran terhadap suatu tindakan politik luar negeri (Risse-Kappen, 1991).

Kemudian faktor yang kedua berasal dari domestik atau struktural Arab Saudi. Klasifikasi yang dapat dianalisa adalah dari birokrasi kerajaan Arab Saudi sendiri. Serangkaian tindakan pertentangan terhadap Swedia (dari mulai pembatalan senjata, penarikan duta besar, blokade pidato, pencabutan visa, hingga pembatalan kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan) merupakan langkah yang diambil Arab Saudi untuk 'menghukum' Swedia karena dianggap melakukan intervensi terhadap kasus Raif Badawi. Jika menurut Volgy & Swharz birokrasi biasanya bersifat statis dan sulit berubah, dan hanya terjadi pada beberapa kasus yang sifatnya konflik (Hagan, Rosati, & Sampson, 1994). Jika terdapat kelompok dalam birokrasi yang ingin merubah politik luar negeri, harus pada isu yang benar-benar vital, karena kebanyakan birokrat bertahan dengan *status-quo* (Hermann C. E., 1990). Pemerintah Arab Saudi (melalui pernyataan Raja Salman) yakin bahwa pemutusan kerjasama tidak akan berdampak signifikan karena masih banyak kerjasama yang dilakukan Arab Saudi dengan negara-negara Barat (*status-quo* Arab Saudi akan tetap stabil apabila melakukan konfrontasi dengan Swedia).

#### D. Implikasi Politik Kasus Kemanusiaan Raif Badawi terhadap Swedia dan Arab Saudi

Pasca insiden kemanusiaan Raif Badawi yang menyebabkan timbulnya ketegangan diplomatik antara Swedia dan Arab Saudi. Implikasi politik yang terjadi diklasifikasikan ke dalam tiga level, yaitu: level bilateral, level multilateral, dan level politik internasional.

##### 1. Implikasi Politik Level Bilateral

Dalam sekup bilateral (hubungan dua negara, Swedia dan Arab Saudi), implikasi politik yang terjadi pasca insiden kritik Wallstrom melahirkan beberapa fenomena baru seperti penarikan duta besar Arab Saudi dari Swedia, pencabutan dan pemberhentian visa bagi Warga Negara Swedia di Arab Saudi yang sempat membuat heboh publik internasional. Implikasi yang lain mencakup banyak kerjasama yang krusial, diantaranya kerjasama pertahanan dan keamanan, kerjasama ekonomi dan perdagangan, kerjasama pendidikan, hingga menjangkau kerjasama yang sifatnya non-politis (kerjasama di bidang margasatwa).

Pasca insiden kritik terjadi, sikap yang diambil Arab Saudi untuk menghukum Swedia diantaranya adalah dengan melakukan penarikan Duta Besar Arab Saudi Ibrahim bin Saad al-Ibrahim dari Stockholm (Heneghan, 2015). Juru bicara Kemeterian Luar Negeri Swedia Erik Boman dan Gabriel Wernstedt menyampaikan bahwa alasan utama penarikan duta besar Arab Saudi dari Swedia adalah karena perihal kritik Swedia yang menyoroti masalah HAM dan demokrasi di Arab Saudi (Ritter, 2015). Penarikan duta besar ini dinilai terjadi secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan kepada pihak Swedia. Penarikan terjadi pada tanggal 11 Maret 2015, beberapa hari setelah insiden pembatalan kerjasama pertahanan dan militer yang dibatalkan oleh Swedia (Dickson, Sennero, Ahlander, Aboudi, & Heneghan, 2015).

Sebelum insiden penarikan duta besar Arab Saudi dari Stockholm terjadi, insiden pembatalan kerjasama militer dan pertahanan antara Arab Saudi dan Swedia terjadi lebih dulu. Pasca kritik yang bersifat tidak diplomatis dilontarkan Swedia atas kasus hukuman Raif Badawi, dan ternyata tidak disambut dengan baik oleh Arab Saudi, Swedia memutuskan untuk melakukan pembatalan kerjasama militer dan pertahanan kedua negara (Nordström, 2018). Kerjasama yang dimaksud adalah perjanjian meliputi sistem militer, pelatihan dan transfer teknologi, senilai 4,8 miliar Crown Swedia (Rp7,3 triliun) pada 2011-2014 (Noli, 2016). Kerjasama keamanan ini bersifat kompleks karena meliputi beberapa jual beli senjata, sistem militer, dan transfer teknologi (Stjernkvist, 2018). Bidang kerjasama militer dan pertahanan juga tidak luput dari bidang *cyber-defense* yang mulai dikembangkan oleh The Saab Group (Setiawan & Dieda, 2017). Kemudian juga terdapat kerjasama *multi-role surveillance* yang merupakan sistem pertahanan luar angkasa bernama Global Eye AEW (Beraud-Sudreau, 2017). Proyek kerjasama pertahanan terbesar kedua negara adalah mengenai pembangunan pabrik nuklir di Arab Saudi yang dinamakan *Simoom Project*. Namun sampai saat ini proyek ini masih tergolong rahasia dan tidak bisa dipastikan apakah termasuk dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang *Military Cooperations and Weapons Trade* (Vapene & Port, 2013).

Sebelumnya, Swedia memang dikenal sebagai salah negara dengan tingkat ekspor persenjataan dan teknologi militer terbesar di dunia. Meskipun terbilang negara 'netral' dan damai, Swedia ternyata berkontribusi dalam proses jual-beli senjata di dunia. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), negara ini menyumbang setidaknya 2% pasokan senjata yang digunakan negara-negara di

seluruh dunia. Swedia bahkan menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan ekspor persenjataan konvensional terbesar (Nilsson, 2011). Selain itu, Swedia juga merupakan negara dengan *supply* persenjataan per-kapita nomer 3 terbesar di dunia, setelah Israel dan Rusia (Jackson, 2014). Neraca perdagangan bisnis militer dan pertahanan di Swedia sendiri meningkat dari tahun ke tahun. Terhitung dari mulai tahun 2000 yang terus meningkat sampai pada tahun 2014. Dari periode 2009 sampai 2013, perdagangan senjata meningkat sebanyak 14% dari periode tahun 2004-2008. Dalam kurun waktu antara 2003 sampai 2013, Swedia menempati posisi ke-12 sebagai negara dengan ekspor persenjataan terbesar di dunia (Nordstjernan, 2014). Di sisi lain Arab Saudi yang merupakan negara dengan total *budget* militer terbesar nomer 4 di dunia merupakan konsumen produk persenjataan dan militer milik Swedia, bersama dengan Uni Emirat Arab (Groll, 2015).

Pembatalan kerjasama pertahanan dan militer ini bukan tanpa hambatan. Keputusan parlemen Swedia untuk melakukan pemberhentian kerjasama ini mendapatkan pertentangan dari kubu Stefan Löfven di partai Sosial-Demokrat. Stefan Löfven sebagai perdana menteri yang sebelumnya pernah menjabat ketua Trade Union Swedia sempat melakukan penolakan bersama timnya kepada Kongres Swedia untuk melakukan bahasan mengenai rencana negosiasi ulang dengan Arab Saudi (Ghany, 2015). Hal yang memudahkan proses pembatalan kerjasama ini adalah karena terdapat banyak pihak yang *pro* terhadap usulan ini di parlemen. Terlebih lagi dari tahun 2011, Parlemen Swedia merumuskan peraturan mengenai regulasi jual beli senjata yang harus didasarkan kepada status demokrasi negara penerima. Peraturan ini melarang Swedia untuk melakukan jual beli senjata pada negara yang anti-demokrasi (Montgomery,

Sweden Sticks to 'Insignificant' Arms Exports to Saudi Arabia, 2018). Selain itu, terdapat ISP (*Inspectorate for Strategic Products* atau dalam Bahasa Swedia dikenal dengan *Inspektionen för strategiska produkter*), yaitu sebuah kebijakan untuk menaikkan regulasi dan fungsi pengawasan di Swedia untuk proses jual-beli perlengkapan militer ke Arab Saudi (Vucetic, 2018). Ditambah dengan perdebatan yang dilakukan oleh kubu Partai Hijau, Partai Kiri (*Christian Democrat*) dan Partai Liberal yang memaksa parlemen untuk mengakhiri kontrak kerjasama militer dengan Arab Saudi. Swedia juga terikat dengan European Union Common Position yang mengontrol proses jual beli senjata agar tidak digunakan sebagai sarana pelanggaran HAM (Perlo-Freeman, 2017). Ditambah tekanan dari Svenska Fred, sebuah organisasi anti-militer yang telah berusia lebih dari 135 tahun. Organisasi ini beroperasi di Swedia mengkonfrontasi kebijakan militer dengan Arab Saudi karena dianggap disalahgunakan untuk kepentingan perang di Yaman (Nasser A. , 2018).

Kemudian terdapat implikasi pada bidang ekonomi. Program perdagangan dan investasi Arab Saudi yang bernama *Saudi Vision 2030* atau *Kingdom's Vision 2030* merupakan salah satu yang terkena aspek politik kasus kemansuaian Raif Badawi. *Saudi Vision 2030* sendiri merupakan sebuah program baru Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan ekspansi program ekonomi, perdagangan, investasi, dan pendidikan yang beragam ke seluruh dunia (Rashad, 2016). Sejak tahun 2008, melalui perwakilan Menteri Keuangan dan Investasi Arab Saudi, Dr. Majid bin Abdullah Al Qasabi, serta perwakilan Menteri Perdagangan Swedia, Amanda, resmi menandatangani kerjasama *Saudi Vision 2030* yang akan berfokus pada edukasi, kreativitas, peran perempuan, dan peningkatan kerjasama ekonomi dan

investasi. Terhitung pada tahun 2008, kerjasama Arab Saudi dan Swedia sudah mencapai jumlah 23 *agreement*. Pada tahun 2015, kerjasama perdagangan dan investasi bahkan mencapai angka 5 miliar SR (Al-Awsat, 2016). Sejak tahun 1950-an, kerjasama perdagangan dan investasi Swedia dan Arab Saudi mengalami peningkatan. Inovasi perdagangan terakhir mencakup sektor baru, yaitu inovasi berbasis lingkungan dan kewirausahaan. Inovasi baru dalam perdagangan dan investasi ini sudah mulai digagas oleh perusahaan-perusahaan besar Swedia seperti Ericsson, AGA, ASEA, dan lain-lain (Tago, 2015).

Namun pasca insiden kritik Swedia terhadap kasus Raif Badawi, beberapa kerjasama ekonomi mengalami guncangan. Pasca insiden pembatalan kerjasama yang dilakukan oleh Swedia, dalam neraca perdagangan (yang ditandai dengan aktivitas ekspor-impor) turun sebanyak 6.5 persen di tahun 2015 (ketika konfrontasi terjadi). Kondisi ini memburuk karena sebelumnya pada tahun 2014 ekspor Swedia ke Arab Saudi sudah terjadi penurunan yang signifikan. Dari tahun 2013 ke 2014, ditandai dengan adanya penurunan ekspor sebesar 12 persen (Wyld & Chase, 2016). Dari sektor usaha menengah, terjadi guncangan ekonomi dalam kerjasama baru yang hendak di gagas tahun 2015. Menuju tahun 2015, Swedia dan Arab Saudi berusaha menjalankan kerjasama ekonomi di bidang *small and medium enterprises*. Program ini merupakan program perdagangan dan investasi baru yang digagas kedua negara di tahun 2015. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Ghassan Ahmed Al-Sulaiman yang merupakan *General Authority for Small and Medium Enterprises* (SMEs) dan Majid Al-Qassabi yang merupakan Menteri Perdagangan dan Keuangan Arab Saudi. Kemudian dari Swedia diwakili oleh Annika Rembe, direktur umum dari Swedish Institute bersama Ann

Linde, Menteri Perdagangan Swedia (Rasooldeen, 2017). Bidang investasi lain yang terganggu adalah adanya beberapa guncangan di sektor investasi politik. Pasca konfrontasi yang disebabkan pembatalan kerjasama pertahanan dan militer secara sepihak, muncul isu penolakan terhadap toko-toko IKEA baru yang dicanangkan akan dibangun di Arab Saudi (Hedegaard & Carlqvist, 2015).

Selain pada bidang pertahanan-militer dan ekonomi, implikasi juga menysasar bidang kerjasama pendidikan antara Swedia dan Arab Saudi. Menurut Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT), Arab Saudi merupakan salah satu negara penyumbang pelajar terbesar di Swedia setelah Iran, Malaysia, dan Indonesia (Petter, 2017). Kerjasama kedua negara juga meliputi transfer pelajar dan pengembangan penelitian di Arab Saudi sebelum tahun 2015 (Arab News, 2017). Beberapa hari pasca konfrontasi terjadi, beberapa pelajar Swedia yang berada di Saudi secara mendadak dipulangkan kembali ke Swedia. Para pelajar dan cendekiawan ini berasal dari Universitas Al-Baha di Arab Saudi. Rektor Universitas Al-Baha, Dr. Abdullah bin Yahya Al-Huessein menyatakan bahwa insiden ini terjadi karena adanya ketegangan diplomatik antara Arab Saudi dan Swedia (Knutsson, 2018).

Implikasi politik tidak hanya menyerang sektor kerjasama saja. Bentuk ketegangan lain yang terjadi pasca kritik yang dilontarkan Wallström adalah terjadinya penarikan visa dan protes besar-besaran yang dilakukan para pelaku bisnis Swedia. Bagi Swedia, Arab Saudi merupakan mitra kerjasama terbesar yang bukan berasal dari Eropa (Sputnik News, 2018). Pasca keputusan kerjasama persenjataan sepihak yang dilakukan oleh Swedia, Arab Saudi mencabut izin visa bagi para pelaku bisnis

Swedia di Arab Saudi. Beberapa hari kemudian, Arab Saudi kembali mencabut izin visa bagi para Warga Negara Swedia yang berada di Arab Saudi sekaligus pencabutan izin perpanjangan visa bagi masyarakat sipil yang berada di Arab Saudi (O'Regan, 2015). Hal itu kemudian memicu protes dari para pelaku bisnis Swedia terhadap pemerintah. Sebanyak lebih dari 31 CEO dari perusahaan-perusahaan besar Swedia seperti The Wallenberg Group, H&M, IKEA, Volvo, dan lainnya mengirimkan surat terbuka terhadap Pemerintah Swedia yang bertujuan untuk mendesak pemerintah agar melakukan perbaikan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi (Angestu, 2015). Menurut Andreas Astrom, salah satu perwakilan dari Stockholm Chamber of Commerce, ketegangan diplomatik akan berdampak negatif terhadap bisnis dan kepentingan Swedia di Arab Saudi, termasuk bagi para pelaku bisnis, dan dalam jangka yang panjang akan mempengaruhi lapangan kerja di Swedia (Bresciani, 2015). Swedia sempat mengadakan pertemuan antara parlemen dengan para pelaku bisnis yang dipimpin oleh Mikael Damberg, Menteri Kewirausahaan dan Inovasi Swedia dan diikuti lebih dari 50 pelaku bisnis dari perusahaan besar yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan, IT, mesin, konstruksi dan bisnis jasa (Defense News, 2015). Bahkan Raja Carl Gustaf XVI sempat memanggil Margot Wallström ke kerjaan untuk mendiskusikan upaya negosiasi ulang dengan Arab Saudi (Cohen, 2015).

Konfrontasi dengan Swedia juga menimbulkan dilema ekonomi terhadap Arab Saudi. Bagaimanapun juga kerjasama dengan Swedia merupakan rangkaian kompleks yang telah berjalan selama lebih dari 70 tahun (Bershidsky, 2015). Kepentingan Arab Saudi di Swedia tidak kalah besarnya dengan kepentingan Swedia di Arab Saudi. Kerjasama yang dilakukan



kedua negara selain bidang ekspor persenjataan, termasuk juga kesehatan, energi, transportasi, dan industri manufaktur. Swedia bahkan melakukan investasi sektor silang di Arab Saudi dalam bidang *cyber city*, *smart city solutions*, teknologi finansial, hingga *public private partnership* (Shakir, 2015). Selain sektor industri dan ekonomi, kerjasama lain juga meliputi bidang pertahanan dan militer, pendidikan, bisnis konstruksi, dan ICT (Biouki, 2015).

Sektor bilateral kedua negara yang terkena imbas politik adalah dalam bidang kerjasama margasatwa. Sebanyak empat ekor monyet kerdil Amazon *Pygmy marmosets* yang ditolak oleh Pemerintah Arab Saudi pasca ketegangan politik muncul. Jonas Wahlstrom selaku pemilik Kebun Binatang Skansen, dimana spesies monyet-monyet kerdil ini berasal berasumsi bahwa munculnya penolakan dari otoritas Arab Saudi berasal dari insiden kritik Swedia terhadap kasus Raif Badawi (Macias, 2015). Dua pasang *Pygmy marmosets* ini rencananya akan dipindah dari Kebun Binatang Skansen menuju Kebun Binatang di Riyadh. Transfer satwa yang dilakukan Swedia ini merupakan salah satu program *breeding* untuk banyak kebun binatang di dunia. Swedia mencanangkan sekitar 500 *Pygmy marmosets* yang akan dikirim ke berbagai kebun binatang negara mitra kerjasama, diantaranya London Zoo dan Riyadh Zoo (Buchanan, 2015).

## 2. Implikasi Politik Level Multilateral

Dampak dari kritik Swedia kepada Arab Saudi tidak hanya terjadi dalam batas hubungan kedua negara saja, namun juga terjadi dalam level banyak negara. Beberapa negara yang berafiliasi dengan Arab Saudi contohnya, yaitu Uni Emirat Arab dan Oman, serta berbagai organisasi Islam seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab ikut berkontribusi dalam konfrontasi kedua negara. Selain

negar-negara mayoritas Islam, negara-negara Barat seperti Inggris, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat juga termasuk.

Pasca kritik yang dilontarkan Wallstrom mengenai model hukuman yang diterima jurnalis Raif Badawi melalui media sosial *twitter*, Pemerintah Arab Saudi tidak membalas cuitan Wallström, namun melakukan aksi lain dalam konferensi multilateral. Arab Saudi melakukan pemblokiran pidato Margot Wallström dalam pertemuan rutin Liga Arab yang dilaksanakan di Kairo, Mesir (Mazel, 2015). Dalam konferensi tersebut, Swedia diundang sebagai tamu kehormatan untuk menyampaikan pidato mengenai hak-hak perempuan. Margot Wallström selaku perwakilan dari Swedia dalam forum tersebut menyatakan bahwa blokade pidato yang dilakukan oleh Arab Saudi (yang mana atas persetujuan negar-negara Liga Arab) merupakan bentuk aksi yang memalukan bagi Pemerintah Swedia. Beberapa politikus dari Swedia juga menyatakan keprihatinan mereka atas insiden pemblokiran pidato dalam sebuah forum internasional (Patnisik, 2015). Politikus seperti Laura Wells, Saleem Javed, dan Christian Christensen menyalahkan otoritas Liga Arab yang membiarkan Arab Saudi melakukan aksi pemblokiran. Sebagain juga menyebut apa yang dilakukan oleh Arab Saudi merupakan sebuah bentuk *bullying* sekaligus peringatan terhadap Swedia dan negar-negara Barat untuk tidak mengkritik isu kemanusiaan yang ada di dalam negeri Arab Saudi (Nelson, 2015). Bahkan Uni Eropa menyatakan kekecewaan terhadap sikap Arab Saudi yang melakukan blokade pidato Wallström di Liga Arab. Pernyataan Uni Eropa ini disampaikan melalui pernyataan Maja Kocijancic, selaku juru bicara European Commission (Milne, 2015).

Ketika konflik memanas, Arab Saudi sempat melakukan penarikan duta besarnya dari Swedia. Aksi

ini ternyata diikuti oleh partner dekat Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Pasca pemulangan duta besar Arab Saudi untuk Swedia dari Stockholm, beberapa hari setelahnya UEA juga menarik duta besarnya, Sultan Rashid Al Kaitoob dari Stockholm (The National, 2015). Tidak hanya melakukan penarikan duta besar, UEA juga mengusir duta besar Swedia untuk Uni Emirat Arab, Jan Thesleff dari Abu Dhabi. Penarikan duta besar UEA ini atas perintah Menteri Luar Negeri Anwar Gargash (AFP News Agency, 2015). Pengusiran duta besar Swedia dari Abu Dhabi disertai oleh surat pernyataan resmi Uni Emirat Arab yang mengutuk tindakan Swedia karena mencampuri hukum Arab Saudi. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab diketahui memiliki hubungan diplomatik yang kuat karena berbagi kesamaan kultur, bentuk pemerintahan, dan motif ekonomi (Fox News, 2015).

Selain menyampaikan kritik terhadap Swedia yang ditipkan melalui Jan Thesleff, Anwar Gargash juga menyampaikan kritik terbuka kepada Swedia. Keterangan Anwar Gargash sebagai berikut: *“These statements violate the principle of sovereignty upon which the normal relations between countries are based. Such remarks are deemed interference in internal affairs as they do not respect the religious and cultural particularities of states and communities”* (statement [Swedia] merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dimana dasar hubungan kedua negara dibangun. Label dan kritik Swedia dianggap sebagai intervensi internal dan mereka [Swedia] tidak menghormati kekhususan agama dan budaya dari negara maupun komunitas) (Middle East Eye, 2015). Tidak hanya menteri luar negeri Uni Emirat Arab saja yang menyampaikan kritik, namun diikuti oleh Liga Arab dan OKI. Kedua organisasi yang berafiliasi kuat dengan Arab Saudi itu menyatakan bahwa sikap Swedia sangat tidak

bertanggung jawab karena mengkritik model Hukum Sharia yang merupakan dasar hukum Arab Saudi. Kedua organisasi tersebut juga menyeru kepada Swedia untuk tidak memaksakan ideologi Barat dan menghakimi ideologi dan nilai moral negara lain (Sullivan, 2015).

### 3. Implikasi dalam Politik Internasional

Dalam lingkup politik internasional, terdapat beberapa implikasi yang terjadi, diantaranya munculnya peristiwa-peristiwa kritik terhadap Swedia dengan konsep moral *superpower*-nya, sorotan terhadap Arab Saudi mengenai kasus-kasus *human rights abuse*, ancaman gagalnya Swedia pada kursi Dewan Keamanan PBB, munculnya gangguan dukungan terhadap isu Palestina, hingga terancamnya Swedia karena kehilangan sekutu di GCC.

Dalam kasus isu Palestina, Arab Saudi berbagi pandangan yang sama dengan Swedia. Hal itu dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Swedia merupakan salah satu negara maju di Eropa yang mendukung proses kemerdekaan Palestina (Tharoor, 2015). Swedia merupakan negara Eropa pertama yang melakukan *vote* dalam forum *United Nations General Assembly* yang kemudian menjadi keputusan *de facto* pengakuan daerah Palestina sebagai daerah merdeka. Swedia kemudian disusul oleh anggota benua Eropa lain, diantaranya: Hungaria, Polandia, Malta, Rumania, Cyprus, dan Slovakia. Beberapa negara Eropa ini mengusulkan usulan *two-state solutions* bagi konflik Israel dan Palestina (Jerusalem Post, 2014). Pasca insiden dukungan terhadap Palestina, Swedia sempat mendapatkan kecaman keras dari Israel dan Amerika Serikat. Juru bicara Palestina bahkan menyebut aksi Swedia sebagai langkah yang berani dan historikal. Dukungan Swedia sejalan dengan prinsip Arab Saudi yang juga mendukung konsep *two-*

*state solutions* bagi kemerdekaan Palestina (Khatib, 2014).

Konfrontasi yang terjadi antar kedua negara akan berakibat buruk terhadap isu Palestina kedepannya. Sejak tahun 1967, Arab Saudi merupakan negara yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Arab Saudi mendukung reolusi konflik Arab-Israel yang menyuarakan sepenuhnya hak-hak warga Palestina untuk menempati wilayah di Israel. Ide dari Arab Saudi ini sampai sekarang terus mendapat respon yang negatif (Weiss, 2006). Di bawah lembaga bantuan King Salman Humanitarian Aid dan Relief Center, Arab Saudi rutin memberikan bantuan terhadap Palestina. Terhitung dari tahun 2000, bantuan yang telah diberikan Arab Saudi kepada Palestina sebanyak 6 triliun dollar. Arab Saudi bahkan pernah menjadi tuan rumah untuk agenda *29<sup>th</sup> Session of Arab League* yang diberi nama “*Summit of Al-Quds*”. Arab Saudi mengumpulkan dana sebanyak 200 miliar dollar untuk Palestina, dimana dana yang terkumpul akan diberikan melalui *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA), dan sisanya diberikan melalui *Palestinian Islamic Waqf Program* di Jerusalem (Kadobnov, 2014).

Selain Arab Saudi, Swedia juga salah satu negara yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sikap Swedia yang pro terhadap Palestina ini menyebabkan timbulnya hubungan yang kurang baik dengan Israel. Sejak pengakuan terhadap Palestina dan dukungan akan konsep *two-state solutions*, hubungan antara Swedia dan Israel kian memburuk. Pasca kritik Wallström terhadap aksi *extrajudicial killing* penduduk Palestina, Wallström sempat mendapatkan penolakan oleh pemerintah Israel ketika hendak berkunjung untuk bertemu Raoul Wallenberg (Eglish, Taylor, & Znotins, 2016). Puncak ketegangan kedua

negara adalah pasca insiden kritik Wallström terhadap peristiwa bom Paris yang dikaitkan dengan konflik Israel-Palestina. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian mengusir Duta Besar Swedia, Carl Magnus Nesser, dan melarang keterlibatan Swedia dalam setiap urusan yang menyangkut konflik Israel-Palestina (Livingstone, 2016). Bahkan pasca insiden dukungan kemerdekaan Palestina, Swedia mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Jen Psaki selaku juru bicara US State Department mengatakan bahwa aksi dukungan kemerdekaan Palestina merupakan langkah yang prematur dan tidak seharusnya dilakukan (Al-Jazeera, 2014). Melalui proyek bantuan baru, Wallström bahkan merancang program bantuan kepada Palestina. Swedia mengadopsi Strategi Bantuan 5 Tahun untuk Palestina berupa bantuan sebesar 500 juta SEK sampai 1,5 miliar SEK (Swedish Government, 2018).

Arab Saudi sebagai negara yang berkontribusi besar terhadap ide kemerdekaan Palestina pada titik ini berpotensi kehilangan mitra yang mempunyai *frame* politik sama. Kondisi ini kemudian menjadi kesempatan bagi Arab Saudi untuk bisa mendapatkan bantuan dari negara-negara Skandinavia, mengingat Swedia mempunyai kapasitas penting dalam kelompok negara Nordic di Eropa Utara (Khatib, Sweden Officially Recognises State Palestine, 2014).

Kemudian selanjutnya dalam kasus pencalonan Swedia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (UNSC) Periode 2017-2019 (Montgomery, 2016). Fokus utama yang akan diangkat Swedia dalam pencalonan anggota UNSC akan berkisar seputar isu hukum internasional, hak asasi manusia, *gender equality*, dan perspektif *humanitarian*. Termasuk dinataranya konflik-konflik Timur Tengah seperti isu kemerdekaan Palestina dan konflik yang terjadi di Yaman, Oman, dan Irak

(Swedish Government, 2018). Sejak beberapa negara teluk seperti UEA dan Oman serta OKI yang mendukung Arab Saudi dalam konfrontasi dengan Arab Saudi, kemungkinan untuk mendapat dukungan dari negara-negara tersebut sangat sulit, terlebih Arab Saudi mempunyai posisi yang kuat di Timur Tengah (Nasser, 2017). Swedia memerlukan dukungan dari negara-negara Teluk untuk proses pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain memerlukan dukungan dari negara-negara Teluk, Swedia juga butuh kontribusi negara-negara tersebut untuk mewujudkan visinya dalam permasalahan di Timur Tengah (Heath, 2016).

Selain itu, implikasi di bidang politik internasional yang terjadi adalah munculnya beragam kritik dan komentar internasional, baik terhadap Swedia maupun Arab Saudi. Setelah menyerang Arab Saudi dengan argument 'kemanusiaan'-nya, Swedia banyak mendapat kritik internasional terkait sikapnya yang dinilai tidak realistis. Media internasional yang mengkritik kebanyakan adalah media-media Timur Tengah. Salah satu media, Arab News mengungkapkan bahwa Margot Wallström melakukan tindakan tanpa perhitungan dan persetujuan dari Parlemen. Cheriff Sayyed selaku perwakilan dagang Arab Saudi di Swedia juga menyayangkan komentar aksi Swedia yang merubah urusan politik menjadi bentuk ketegangan agama (Al-Watan, 2015). Tidak hanya dari media Timur Tengah, beberapa cendikiawan Barat juga mengkritik konsep Politik Luar Negeri Swedia. Maysam Behraves, seorang jurnalis Barat menulis bahwa kasus konfrontasi Swedia dan Arab Saudi pasca insiden kemanusiaan Raif Badawi merupakan sebuah pertarungan *gender*. Arab Saudi diposisikan sebagai negara "maskulin" yang berbasis religi dan autokrasi melawan Swedia yang merupakan

lambang “feminisme” dengan sistem sosial-demokrat (Behraves, 2015).

Swedia memang sudah menerapkan politik luar negeri berbasis HAM sejak era kepemimpinan Olof Palme tahun 1970 (Bjereld, 2016). Sejak dipihinya Margot Wallström sebagai Menteri Luar Negeri Swedia pada tahun 2014, muncul gagasan baru untuk menerapkan sistem baru yang sering disebut sebagai Politik Luar Negeri Feminisme. Politik Luar Negeri ini mempunyai 3 Poin ‘R’ diantaranya: (1) *rights*, merupakan promosi terhadap isu-isu perempuan, termasuk penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan; (2) *representation*, termasuk dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan di segala level; dan (3) *resources*, untuk memastikan alokasi yang adil terhadap semua masyarakat tanpa memandang *gender* (Vogelstein & Bro, 2019). Namun pasca insiden Raif Badawi, komentar muncul dan menyerang konsep baru yang diusung Swedia ini. Beberapa menyebut bahwa Politik Luar Negeri Feminis merupakan hal yang hipokrit, karena sangat bertentangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Beberapa mengkritik Swedia bersikap inkonsisten terhadap prinsip HAM, yang kemudian dikaitkan dengan perdagangan senjata dengan negara-negara ekstremis seperti Iran dan Qatar (Taylor, Sweden’s subtly radical ‘feminist’ foreign policy is causing a stir, 2015). Beberapa media Barat juga menyebut prinsip moral kemanusiaan dan hak-hak wanita yang diusung Wallström tidak relevan dengan kondisi domestik Swedia. Pemerintah berusaha membangun citra internasional dan berusaha menutupi kasus pelanggaran HAM di dalam negeri. Sebelum melontarkan kritik terhadap hukuman Raif Badawi, dalam negeri Swedia telah terjadi beberapa kasus pemerkosaan dan pelecehan terhadap perempuan. Kasus berat yang terjadi terkait



munculnya pelecehan seksual oleh kaum minoritas yang berusaha ditutupi oleh pemerintah (Maitra, 2017). Beberapa kritik lain menyangkut isu jual beli senjata Perusahaan Wallenberg dan absennya Swedia untuk menolak partisipasi Arab Saudi dalam UN Women's Rights Commission, mengingat negara tersebut mempunyai *track record* yang buruk dalam memperjuangkan hak-hak perempuan (Shah, 2018).

Arab Saudi juga tidak lepas dari kritik internasional. Pasca insiden terhadap Raif Badawi dan konfrontasi dengan Swedia, publik menilai Arab Saudi sebagai negara anti-kritik yang menerapkan politik luar negeri sarat beban (Randall, 2016). Media-media Barat menyebut Arab Saudi sebagai negara ditaktor yang kejam (Angestu, 2015). Kritik lain yang dilontarkan antara lain terkait dengan isu agama minoritas, represi kaum homoseksual, hukuman pengadilan yang tidak manusiawi terhadap terdakwa kejahatan penistaan agama, isu hukuman potong tangan, hingga hukuman mati (Amnesty International, 2014). Beberapa media kembali mengangkat peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Arab Saudi sebelumnya. Sebut saja Abdulaziz al-Shubaily dan Issa al-Hamid yang dipenjara karena mendirikan organisasi bernama Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA), kemudian Ashraf Fayadh yang dianggap melakukan penistaan agama ketika tertangkap merobek-robek salinan *Al-Quran* (Human Rights Watch, 2016). Kemudian terdapat dua aktivis HAM, yaitu Mikhlif bin Daham al-Shammari and Omar al-Sa'id yang masing-masing mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 200 kali dan 300 kali. Juga kasus yang terjadi kepada pekerja migran asal Filipina, Ruth Cosrojas, yang dihukum cambuk 300 kali (Amnesty International, 2014). Kemudian pada 2009, terdapat juga kasus Mazen Abdul-Jawad yang dihukum cambuk 1000 kali karena berbicara

mengenai kehidupan seks di TV, dan Israa al-Ghomgham yang mendapat hukuman mati karena tertangkap melakukan dokumentasi peristiwa demonstrasi di Provinsi Timur Arab Saudi. Tidak ketinggalan kasus seorang Warga Negara Inggris berusia 74 tahun dihukum penjara karena kedapatan meminum alkohol pada tahun 2014 (Perper, 2018).

Beberapa NGO dan media juga mengkritik Arab Saudi terkait eksekusi hukuman mati. Sepanjang periode Januari sampai November 2015, Arab Saudi telah melakukan eksekusi terhadap sebanyak 152 terpidana kasus pembunuhan dan narkoba. Publik juga menyangkutkan kembali kasus yang terjadi pada Desember 2014, dimana Arab Saudi menahan dua wanita yang tertangkap mengemudi di sekitar perbatasan Uni Emirat Arab. Kasus mengenai diskriminasi *migrant workers* juga tidak luput dari kritik media. Pada Bulan Maret 2015, Arab Saudi kedapatan melakukan deportasi sebanyak 300.000 imigran yang tinggal di negara tersebut. Tidak hanya urusan domestik, sikap Arab Saudi dalam konflik di Yaman juga kembali menjadi sorotan. Kampanye serangan udara Arab Saudi terhadap militan Houthi di Yaman mendapatkan banyak respon negatif. Dalam kurun waktu Maret sampai Juli 2015, sebanyak 2.112 warga sipil menjadi korban dalam perang tersebut (Coogle, 2015). Media juga mempertanyakan sikap PBB yang tidak memberikan sanksi terhadap Arab Saudi terhadap kasus kemanusiaan Raif Badawi (Perper, 2018).